

Agenda
Aksi

**Liberalisasi
Ekonomi
dan
Politik
di Indonesia**

Agenda
AKSI
Liberalisasi
Ekonomi
dan
Politik
di Indonesia

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Rizal Ramli | M. Dawam Rahardjo |
| Suwarsono | Hamzah Haz |
| Anggito Abimanyu | Edy Suandi Hamid |
| Arief Ramelan Karseno | Umar Juoro |
| Nopirin | Baceliuss Ruru |
| Syafaruddin Alwi | Lance Castles |
| A.A. Baramuli | Ariel Heryanto |
| Anwar Nasution | A. Tony Prasetyantono |
| Nurimansyah Hasibuan | Nazaruddin Syamsuddin |



Diterbitkan oleh:
Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UII
Bekerjasama dengan
PT. Tiara Wacana Yogya



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahardjo, Dawam

Agenda aksi liberalisasi ekonomi dan politik di Indonesia/Dawam Rahardjo; Tim Editor, H. Kumala Hadi. --Cet. 1.-- Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.

xii + 371 hlm.; 21 cm.

ISBN 979-8120-76-0

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Indonesia -- Keadaan Ekonomi pemerintahan | 2. Indonesia -- Politik dan H. Hadi, Kumala, Haji. |
| I. Judul | |

330.959 8

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Memfoto copy atau memperbanyak dengan cara apa pun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia

Tim Editor • Drs. H. Kumala Hadi, MS.Ak.

• Drs. H. Suwarsono, MA,

• Drs. Usman Thoyib, MM

• Drs. Sutrisno, MM,

• Drs. Bachruddin, MS

• Drs. Suharto

Desain sampul • Nur Edi Sudjarmiko

Penyunting • Imron Rosyidi

Susun huruf • PPM FE UII Yogyakarta

Tata letak • Ramyari

Cetakan pertama • Desember 1997

Penerbit • PT Tiara Wacana Yogya (Anggota IKAPI)

bekerja sama dengan

PPM FE UII Yogyakarta

Dicetak oleh • PT Tiara Wacana Yogya

Kopen-Banteng No. 16

Jl. Kaliurang Km. 7,8 Telp./Fax. (0274) 880683

Yogyakarta 55581

DARI REDAKSI

ERA pasar bebas yang akan kita hadapi bersama di masa mendatang, di satu sisi kiranya membutuhkan kesiapan dan penyusunan strategi (ekonomi dan politik) tertentu agar tidak menjadi terpelanting karenanya. Di sisi yang lain, bagaimana strategi yang dirumuskan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan dapat menjaga apa yang dikenal dengan sustainable development.

Buku ini --semula berasal dari draft hasil seminar Pusat pengembangan Manajemen (PPM) UII-- merupakan suatu upaya konseptualisasi perencanaan menghadapi Era pasar bebas. Dengan menitik beratkan analisis SWOT --Strenght (kekuatan), Weekness (kelemahan), Oportunity (kesempatan) dan treat (ancaman)-- dalam buku ini memuat kajian ekonomi dari berbagai perspektif dalam kaitannya menyongsong era pasar bebas yang meniscayakan adanya leberalisasi ekonomi.

Oleh karena itu, buku ini sangat baik dibaca kalangan pengusaha, para akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum, paling tidak untuk meraba-raba dimanakah posisi ekonomi kita dalam era pasar bebas tersebut? Selamat membaca.

Red. TWY

Amatlah penting melibatkan para ahli ilmu-ilmu sosial di samping ahli ekonomi, sehingga dapat dikembangkan pembudayaan *keluarga sadar wirausaha* yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi modern dan tradisional sekaligus, di samping politik perlindungan dan advokasi.

LIBERALISASI EKONOMI: BERKAH ATAUKAH BENCANA?

Ariel Heryanto^{*)}

Pendahuluan

Thema yang diminta kepada saya adalah “Transformasi Budaya Indonesia dalam rangka Mendukung Liberalisasi Ekonomi dan Politik”. Thema ini diuraikan lebih lanjut dalam tiga butir sub-thema, salah satu di antaranya berbunyi “Rancangan Strategi Transformasi Budaya dalam rangka Mendukung Liberalisasi Ekonomi”.

Untuk dapat memenuhi pesanan seperti itu, orang harus paling sedikit memenuhi tiga prasyarat. Pertama, ia memahami apa yang dimaksud panitia dengan istilah “liberalisasi ekonomi” sebagai dimasukkan untuk keperluan seminar ini. Kedua, ia harus setuju bahwa liberalisasi ekonomi memang sesuatu yang baik dan perlu didukung. Ketiga, orang yang sama juga harus berpandangan bahwa transformasi budaya tidak saja dapat dirancang, direkayasa, atau dikemas menjadi sebuah proses transformatif, tetapi juga dapat mendukung liberalisasi ekonomi.

Berbagai asumsi itu menumbuhkan sejumlah pertanyaan mendasar. Misalnya, yang menyangkut kaitan antara “ekonomi” dan “budaya”. Apakah dinamika budaya tidak akan dengan sendirinya mendukung liberalisasi ekonomi seandainya tidak dirancang dengan sadar, cermat dan sengaja agar mendukung liberalisasi ekonomi? Tidakkah justru dinamika budaya tunduk, patuh dan menjadi bulan-bulanan dalam proses sosial yang disebut liberalisasi ekonomi? Beberapa peristiwa mutakhir di Indonesia perlu disimak untuk menjawab ini.

Kalau pun benar bahwa budaya dapat dirancang agar mendukung liberalisasi ekonomi itu, siapakah di antara kita yang mau dan mampu merekayasa transformasi budaya untuk mendukung liberalisasi ekonomi? Ini bukanlah masalah pribadi atau selera individu seseorang.

^{*)} Penulis makalah ini pernah sebagai Dosen UKSW Salatiga.

Apakah perancang strategi kebudayaan itu sosok representatif untuk 190 juta warganegara Indonesia? Bukankah masyarakat Indonesia itu majemuk? Seberapa banyak dan bagian masyarakat mana yang memahami, menyetujui dan diuntungkan oleh liberalisasi ekonomi/politik? Para akademisi dan ahli ilmu ekonomi yang mungkin menjadi mayoritas dari pertemuan ini? Para teknokrat dan birokrasi pemerintahan yang menyusun GBHN? Para pedagang kecil dan menengah bersama seluruh konglomerat Indonesia? Para buruh yang jumlahnya berlipatganda karena proses yang terlanjur sering dijuduli liberalisasi ekonomi, tetapi masih terus-menerus memperjuangkan hak normatifnya yang minim?

Mungkin ada yang menganggap masalah-masalah ini di luar lingkup diskusi seminar kita. Kita belum keluar terlalu jauh, dan kita keluar dengan alasan yang pantas. setiap kajian akademik perlu mempertanggung-jawabkan bagaimana pembatasan lingkup diskusi itu ditetapkan, dan apa konsekuensinya. Pembatasan lingkup sebuah kajian tidak pernah obyektif atau bebas nilai. Kita sudah sering mendengar betapa banyak persoalan liberalisasi ekonomi Indonesia dihindari dalam perkuliahan resmi di perguruan tinggi karena dianggap di luar "masalah ekonomi".

Apa yang saya uraikan berikut ini merupakan hal-hal elementer dan tidak orisinal. Namun menurut hemat saya semua hal ini layak diajukan di sini. Baik yang menyangkut secara langsung pokok-pokok bahasan yang diharapkan panitia, maupun yang menyangkut pandangan saya pribadi tentang pokok-pokok tersebut. Saya akan mulai dengan sebuah gambaran makro.

Gelombang Kapitalisme

Apa yang belakangan berlangsung gencar dan terlanjur dijuduli "liberalisasi ekonomi" merupakan sebagian dari sebuah gelombang perubahan sosial yang besar dan cukup lama, yang dinamakan kapitalisme. Mendiskusikan makna liberalisasi ekonomi Indonesia bagi perubahan masyarakat ini, tanpa menempatkannya dalam konteks makro yang disebut kapitalisme, merupakan sebuah pekerjaan sia-sia. Ibarat membahas bahaya AIDS semata-mata dengan mengandalkan khotbah tentang moral dan neraka.

Liberalisasi merupakan sebuah istilah populer yang pada dasarnya bermakna "pembebasan". Maka jika kita bicara tentang liberalisasi, kita perlu menjelaskan tentang pembebasan dari apa? dan juga untuk kepentingan siapa? Tanpa mempedulikan pernyataan-pernyataan gampang tapi berat seperti itu, kita tak akan pernah paham mengapa liberalisasi ekonomi dielu-elukan di seantero negeri ini, tetapi yang dulu pernah kita kenal sebagai pembebasan perempuan (*women's liberation*) dan teologi pembebasan (*liberation theology*) justru dilarang.

Liberalisasi ekonomi pada dasarnya merupakan pembebasan ruang-gerak pemodal (kapitalis) dan permodalan (kapitalisme) dari berbagai rintangan yang selama ini menghadangnya. Beberapa rintangan yang pernah kita kenal antara lain adalah: campur-tangan negara yang terlalu kuat (Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Politik adalah Panglima maupun Panglima yang Berpolitik), gerakan serikat buruh dan radikalisme kiri yang populis, langkanya sumberdaya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Juga masalah minoritas etnis, korupsi, proteksi, dan monopoli.

Diskusi ini tak usah dibebani pelik-pelik definisi kapitalisme. Cukup untuk dicatat bagian-bagian dari kapitalisme yang biasanya dianggap mendasar meliputi perlindungan terhadap hak milik pribadi (termasuk harta yang ditimbun sebanyak apa pun); pasar yang mawadahi berlangsungnya persaingan (bebas, setengah-bebas, atau seakan-akan bebas); proses produksi yang pertama-tama dan terutama didorong oleh kepentingan mencapai laba sebesar-besarnya, dan menimbun modal; serta semakin terbelahnya kehidupan masyarakat menjadi dua kelas sosial yang kepentingannya bukan hanya berbeda (majemuk), namun saling bertentangan (kebahagiaan di satu pihak merupakan bencana bagi pihak lain), yakni antara kelas pemilik modal dan kelas buruh.

Kapitalisme dalam berbagai bentuknya sudah menjadi bagian dari seluruh sejarah Indonesia. Bahkan pembentukan bangsa-negara Indonesia (atau yang dinamakan "kebangkitan nasional") tidak terlepas dari berlangsungnya proses kapitalisme dunia. Tetapi selama ini kapitalisme berkembang dengan susah-payah. Inilah yang membedakan seluruh sejarah masa lampau itu dengan dekade 1990-an. Kini

kapitalisme mengalami masa kejayaan di sejumlah negara Asia Timur dan Tenggara. Di Indonesia sendiri kapitalisme belum pernah tumbuh sehebat, secepat, dan sesegar seperti sekarang ini.

Mengikuti berbagai pemikiran klasik di kalangan ilmu-ilmu sosial yang diilhami Hegel dan Marx, kita dapat mempercayai bahwa zaman emas kapitalisme ini merupakan sebuah "hukum gerak sejarah". Peristiwa ini tidak sepenuhnya diciptakan dengan sadar dan sengaja oleh siapa pun, dan tidak dapat dibatalkan semauanya oleh siapa pun. Apakah gerak sejarah ini merupakan suatu kemajuan atau kemunduran bagi kesejahteraan umat manusia dapat diperdebatkan, tanpa banyak mengubah hukum sejarah itu sendiri. Hegel dan Marx sendiri menilai sejarah ini bergerak maju, walau melewati jalan penuh jurang dan duri yang menyakitkan.

Salah satu sumber perbedaan penilaian tentang baik-buruknya kapitalisme adalah adanya jurang kesejahteraan yang dialami warga masyarakat. Seperti halnya semua tata-sosial yang lain, kapitalisme tidak membagikan kesejahteraan sosial secara merata. Ia lebih banyak menguntungkan sebagian warga masyarakat sambil menyengsarakan warga lain. Tentu saja tidak sepenuhnya kontras secara hitam-putih. Kapitalisme lebih banyak menguntungkan walau sedikit-sedikit menyusahkan kaum bermodal. Ia lebih banyak menyengsarakan walau sedikit-sedikit meningkatkan kesejahteraan kaum buruh.

Perbedaan karikatural ini sekadar untuk diingat bila kita mempertanyakan apakah liberalisasi ekonomi merupakan sesuatu yang baik dengan sendirinya, dalam dirinya sendiri, atau bagi semua umat manusia. Ataukah justru sebaliknya? Apakah liberalisasi ekonomi memang sesuatu yang perlu disyukuri, ataukah ia merupakan sejenis bencana yang perlu diatasi? Atau sesuatu yang sekaligus ada bencana dan berkahnya? Kita layak memahami gejala liberalisasi ekonomi ini secara jeli sebelum buru-buru memberikan kebulatan tekad dan dukungan bulat-bulat, misalnya lewat rekayasa politik atau rancangan strategi budaya.

Ganti Zaman, Ganti Kawan/Lawan

Kapitalisme yang sedang marak di Indonesia (dan Asia Timur serta Tenggara pada umumnya) tidak terjadi secara mulus dan

mendadak. Walau sudah mencapai sejumlah prestasi gemilang, ia masih mengidap kegagapan dan kegugupan dalam melalui sebuah masa transisi panjang dari statusnya yang lama sebagai terpasung menjadi bebas. Saya akan membahas sejumlah prestasi gemilang yang sudah dicapainya. Tetapi sebaiknya kita tengok dulu kesulitan yang dilaluinya dalam masa transisi ini.

Salah satu tanda dan dampak berlangsungnya transisi sebelum dan sesudah mantapnya kekuasaan ekonomi kapitalisme adalah perubahan (suksesi) kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat. Secara gamblang ada tiga perubahan yang penting.

Pertama, merosotnya kekuasaan yang dulu terpusat pada negara Orde Baru. Yang kini terjadi, bukannya menguatnya apa yang belakangan populer dengan istilah *civil society*, tetapi kekuasaan burjuasi swasta. Dengan kata lain, berbeda dari gambaran yang lazim di masyarakat, kekuatan yang paling subversif merongrong Orde Baru bukannya komunisme, fundamentalisme agama, bukan pula gerakan radikal para mahasiswa atau organisasi non-pemerintah. Yang merongrong mereka adalah proses kapitalisme yang berkembang dengan disponsori Orde Baru sendiri dengan istilah Pembangunan.

Kedua, semakin kokohnya kelas kapitalis ini sedikit banyak telah memperlunak ketegangan "pribumi versus non-pribumi" yang selama ini menjadi penyakit kronis bagi perkembangan kapitalisme domestik. Seperti diamati oleh Yoon Hwan Shin, kelas kapitalis yang terbentuk masa kini bertampang lebih merata secara rasial.¹ Tentu saja sentimen etnis-rasial tidak sepenuhnya lenyap. Tetapi penting untuk dicatat bahwa sekarang ini kita saksikan untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru keakraban rasial di kalangan para pengusaha besar dalam lima belas tahun terakhir. Dalam ratusan, mungkin dalam ribuan, demonstrasi oleh dua kelompok demonstran terpenting di Indonesia selama 15 tahun terakhir, yakni mahasiswa dan buruh, tampaknya tidak pernah ada slogan-slogan anti-Cina seperti para pendahulu mereka di periode sejarah yang lampau. Kalau belakangan ini SARA masih dianggap menjadi masalah, maka isi masalahnya banyak berubah dari

¹ Yoon Hwan Shin, *The Role of Elites in Creating Capitalist Hegemony in Post-Oil Boom Indonesia*, Indonesia, special edition, 1991, hlm. 127-143.

soal S (Suku) dan R (Rasial) ke soal A (Agama) dan A (antar golongan).

Ketiga, mengentalnya kemesraan rasial dalam kelas burjuasi diikuti pula meledaknya jumlah, interaksi, dan kegelisahan sebuah kelompok baru dalam masyarakat Indonesia yakni buruh. Maka persoalan A (Antar golongan) dalam SARA yang tersebut di atas dapat dibaca sebagai "antar kelas sosial". Gerakan buruh tampaknya semakin lama semakin membengkak, jikalau bukannya mengungguli gerakan oposisi dari kelas menengah (mahasiswa, organisasi non-pemerintah, seniman, intelektual, dsb.). Jika dugaan ini benar, maka yang menjadi sponsor utama membengkaknya buruh dan radikalnya mereka tak lain tak bukan gencarnya perkembangan kapitalisme industrial itu sendiri.

Sedikit banyak, berbagai konflik sosial bercorak "kelas menengah" yang belakangan marak di Indonesia dapat dipertimbangkan dalam kerangka di atas. Yakni konflik di lingkungan yang biasa dikatakan *civil society*, kelas menengah swasta, atau pun gerakan pro-demokrasi. Yang paling tenar tentu saja adalah konflik "internal" di dalam lingkungan jurnalis profesional (kasus TEMPO-Editor dan TEMPO-Gatra atau DeTIK-Target, juga PWI-AJI), konflik yang terjadi di kalangan sejumlah kampus, dengan kasus di UKSW sebagai contoh paling klasik, maupun konflik di kalangan aktivis non-pemerintah, dengan kasus YLBHI sebagai kasus paling banyak disorot.

Dalam berbagai konflik itu, masalah hubungan kerja berporos modal buruh/karyawan telah menggeser pertentangan ide, ideologi, personal, atau rasial. Pemogokan, ancaman PHK, dan iming-iming tawaran honorarium atau gaji besar telah menjadi salah satu pusat dinamika yang menjalankan sejarah sosial Indonesia mutakhir, dan akan lebih banyak mendikte sebagian besar dari kita di tahun-tahun mendatang. Dalam konteks yang sama dapat dipahami bagaimana pementasan seni instalasi 1001 patung Dadang Christanto senilai Rp 300 juta dan acara pembacaan puisi oleh Rendra menjadi kontroversial di kalangan sebagian pecinta kesenian.

Transisi Kapitalisme

Kesulitan utama yang dihadapi kapitalisme Indonesia dalam tahap pertumbuhannya yang sekarang adalah statusnya sebagai anak

haram. Kapitalisme Indonesia sudah tumbuh cukup gemilang secara ekonomis, walau masih ada berbagai cacat di sana-sini. Ia telah menjadi salah satu bagian dari kisah "keajaiban Asia" karena tingkat dan stabilitas pertumbuhan ekonominya. Ia juga telah melahirkan ratusan konglomerat, di antaranya terkaya di seluruh wilayah Asia. Tetapi secara politik, budaya, dan moral, kapitalisme masih menjadi semacam momok atau makhluk kudisan.

Itu sebabnya istilah "kapitalisme" masih dihindari atau sedikit-tidaknya dipakai dengan harap-harap cemas. Di masa Orde Baru, istilah "kapitalisme" tidak separah istilah "komunisme", tetapi juga tidak sepenuhnya bebas dari beban stigma yang pernah terbentuk sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga berkuasanya rezim Demokrasi Terpimpin. Hingga kini kapitalisme masih sesekali digunakan dalam slogan politik sebagai umpatan, terutama dalam spanduk demonstrasi mahasiswa pasca-NKK/BKK. Istilah-istilah seperti wiraswasta, swastanisasi, deregulasi, debirokratisasi, keterbukaan, konglomerasi, atau liberalisasi ekonomi lebih banyak digunakan sebagai gantinya. Ketika istilah "liberalisasi" memasyarakat, orang menggunakannya dengan apologia: ini tidak sama dengan "liberalisme".²

Setelah mantap membangun kekuasaan ekonomis, agenda utama berikut bagi kapitalisme Indonesia adalah melebarkan sayap kekuasaan ke wilayah lain: budaya, moral, intelektual, bahkan bila mungkin religius. Kesibukannya bukan lagi mengejar laba tetapi mengkampanyekan semboyan hidup "kapitalisme itu enak dan perlu", bila perlu dengan biaya finansial yang tidak kecil. Caranya? Ada banyak. Termasuk munculnya tradisi baru pembacaan puisi di kalangan konglomerat dan pejabat tinggi negara, dan Deklarasi Jimbaran. Yoon Hwan Shin pernah membacakan novel ini berpanjang lebar. Bila Yoon menyaksikan Seminar semacam ini, dengan mudah ia akan menggolongkannya sebagai salah satu contoh ajang kampanye ideologi kapitalisme.

Dalam konteks seperti itu dapat kita pahami ucapan-ucapan luar biasa dari juru-kampanye pro-pasar bebas Indonesia seperti Kwik

²) Lihat Tajuk Rencana Kompas (8 Desember 1994) berjudul Liberalisasi Perdagangan Bukan Berarti Liberalisme.

Kian Gie dan Christianto Wibisono. Inilah yang pernah dikatakan Kwik di awal tahun 1995:

“liberalisme dan juga kapitalisme itu baik semuanya, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Maka tidak apa-apa kalau kita terang-terangan mengatakan bahwa liberalisasi yang sedang kita jalankan memang sama dengan menjalankan liberalisme Juga tidak apa-apa kalau dikatakan terang-terangan bahwa berjayanya swasta sekarang ini adalah perwujudan paham kapitalisme”.³

Masalahnya bukan isi pernyataan Kwik itu benar atau salah, tetapi sungguh menarik mengapa dan bagaimana ia merasa perlu menekankan apa yang dikemukakannya itu berkali-kali, dan baru sekarang.

Seminggu sebelumnya, Christianto Wibisono membedakan liberalisme klasik yang dinilainya tidak manusiawi dengan apa yang dikampanyekannya sebagai “Liberalisme modern ... yang menerapkan jiwa dan semangat ... UUD 1945 dan Pancasila secara murni, konsekuen dan konsisten”. Berdasarkan pandangan demikian, ia membuat kesimpulan bahwa berbeda dari Indonesia, “Eropa, AS, dan Jepang justru sudah berjiwa Pancasila sejati” karena mereka sudah mengamalkan “P-4 secara konkret di lapangan”.⁴

Membudayakan Komoditas Kapitalis dan Mengkomodifikasi Kebudayaan

Kapitalisme mutakhir seperti yang kini marak di Indonesia bukan sekadar kapitalisme yang muncul belakangan.

Salah satu hal yang menjadi ciri kapitalisme mutakhir adalah tercampur-aduknya batas-batas antara ekonomi dan budaya. Ada yang merumuskannya sebagai kapitalisme yang secara habis-habisan membudayakan komoditas kapitalis dan sekaligus mengkomodifikasi praktik dan karya budaya.

³) Liberal, Liberalisasi dan Liberaalisme, Kompas, 2 Januari 1995, hlm. 1, 13.

⁴) Pancasila dan Liberalisme, Kompas, 24 Desember 1994, hlm. 12.

Di atas tadi telah disebutkan beberapa contoh dibudayakannya dunia usaha dan identitas para aktornya. Misalnya digalakkannya tradisi baru pembacaan puisi oleh para konglomerat dan pejabat tinggi. Sebenarnya tradisi serupa berlangsung dalam sejumlah bidang kesenian lain, yakni musik dan seni lukis. Seni dan kebudayaan juga secara hebat-hebatan menjadi ujung tombak pertarungan antar usaha. Ini tampil secara gamblang dalam dunia periklanan, properti dan makanan.

Bersaing dalam dunia usaha berarti bersaing menampilkan citra paling menawan di hadapan publik. Misalnya lewat iklan, tetapi juga dalam merancang bungkus kemasan produk. Membuka toko retail yang baru dan menantang bersaing dengan toko-toko serupa yang sudah hadir, berarti mengandalkan kreativitas seni merancang gedung toko (warnanya, bentuknya, pencahayaan lampunya, sampai penataan ruang-dalamnya) juga warna-warna seni/budaya di dalam pusat pertokoan itu. Bukan ini dan kualitas barang yang dijual atau bersaing harganya. Restoran-restoran kelas atas tidak hanya bersaing dalam memperpanjang pilihan menu, atau kualitas masakan yang dihidangkan, tetapi juga harus pandai-pandai memilih nama yang eksotik dan menampilkan seni menata-hidangan yang cantik.

Semua ini hanya sebagian sebagai bagian dari maraknya gaya-hidup. Ini sekaligus menjelaskan proses dari arah yang sebaliknya. Bukan saja orang beradu kreativitas estetik dalam berdagang, tetapi juga sedang terjadi adu-dagang dalam dunia kesenian. Contohnya sudah terlalu banyak kita dengar. Industri pariwisata menjadi salah satu motor utama dalam meledaknya industri kapitalisme yang menciptakan berbagai “tradisi” asli Indonesia atau ratusan masyarakat etnisnya.

Penutup

Dalam konteks seperti itu sulit untuk menyetujui keluhan klasik berbagai pihak bahwa kesenian dan kebudayaan tersisih dalam dinamika kapitalisme mutakhir. Tidakkah yang terjadi justru sebaliknya, walau yang terjadi melibatkan “seni-budaya” dalam pengertian yang berbeda dari yang selama ini dikeramatkan beberapa pihak? Tetapi tepatkah mengatakan seni-budaya yang populer saat ini “hanya” barang dagangan yang tidak berkualitas estetik?

Dalam kerangka yang saya ajukan di atas, kelihatan betapa mubazir menyiapkan sebuah "strategi transformasi budaya" untuk mendukung liberalisasi ekonomi. Dukungan itu sudah terjadi jauh lebih gencar dan mendalam daripada yang selama ini pernah dibayangkan orang. Tetapi dukungan itu bukan tanpa masalah, dan perlawanan. Dukungan itu juga terjadi timbal-balik dalam suatu masyarakat yang menjalani transisi perubahan sosial besar-besaran, tanpa pernah ada yang memikirkan diselenggarakannya sebuah seminar bertema "Peran Liberalisasi Ekonomi dalam Menunjang Transformasi Budaya dan Kesenian".

Bukan saja kaum ekonom dan teknokrat yang ketinggalan memahami berbagai perubahan sosial di zaman pasca-modern ini. Mereka masih menganggap budaya tak lebih dari sekadar alat-bantu atau aksesoris bagi mesin pembangunan yang berporos pada ekonomi dan teknologi. Celaknya, banyak pengamat dan pecinta seni dan budaya pun berkubang dalam kerangka romantisme Eropa abad 18, meratapi kesenian yang dianggap semakin bangkrut ditelan gelombang kapitalisme mutakhir dengan nama resmi liberalisasi ekonomi.

INDEKS

A

Abdulgani, Ruslan, 247
Adoh watu, cedhak ratu, 17
Anggaran regional, 71
Aspects of the Banking Sector Reforms, 136

B

Banks Under Stress, 151

C

Cina, 263
civil society, 363
Clark, 42
Credit System, 140
critical issue, 274
cukong, 286

D

Dampak sosial, 72
Dampak Urbanisasi, 70
Dasaad Muslim Concern, 230
Demokrasi Ekonomi, 245
demokrasi liberal, 44
Development Financing, 124
discretionary-power, 38
disguised unemployment, 1
Djiwandono, Soedradjad, 281
Djohor, Djohan, 230
domestic affair, 274
dumping price, 240

E

Ekonomi Pancasila, 245
ekonomi politik, 276

"Ekonomi Terpimpin", 247
Eurocentrisme, 348
Evaluasi dan koordinasi, 72

F

Financial Assets, 128
Foreign Exposure, 145
Fukuyama, 339
Furnival, 259
future development, 98

G

Gie, Kwik Kian, 196, 212, 351, 366
globalisasi-liberalisasi, 273

H

Hegel, 362
Hill, Hal, 281
Huntington, Samuel, 339

I

Implementations of the Prudential Regulations, 147
Inadequate Market Infrastructure, 151
Integrasi horizontal, 249
integrasi vertikal, 249
interest group, 283

J

Jepang, 273
Jerman, 278

K

kapitalisme finansial, 196